

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang Dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah munculnya suatu bangsa baru yang serasi, melainkan suatu pertarungan pertarungan yang sering kali keras itu, terdapat suatu rasa rindu akan kemerdekaan. Tradisi nasional berikutnya yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu selama Revolusi hanya mempunyai sedikit dasar sejarah. Akan tetapi, keyakinan bahwa itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan –pengorbanan yang dilakukan atas nama Revolusi, memang didukung banyak fakta.¹

Sejalan dengan pernyataan di atas, menurut Sudijono Djojoprajitno, bahwa revolusi Indonesia adalah “masyarakat bersenjata” yang bergerak menghancurkan

¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 446.

benteng pertahanan imperialisme di Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ditegakkan oleh revolusi rakyat.²

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia di proklamirkan. Setelah memproklamirkan Kemerdekaan, Pemerintah Indonesia pun segera dibentuk di Jakarta pada akhir Agustus 1945. Pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebelum menyerahnya Jepang.³ Setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus Hatta ditetapkan oleh PPKI sebagai Wakil Presiden, dengan Soekarno sebagai Presiden.⁴

Selama beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, suasana di Indonesia masih belum menentu. Dalam masa itu Belanda dengan dukungan Sekutu berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya atas wilayah Indonesia. Banyak sekali cara yang mereka jalankan untuk meruntuhkan kembali negara yang baru merdeka ini. Antara lain lewat propaganda yang luas, Salah satu isi propaganda mereka ialah menuduh Soekarno-Hatta sebagai “boneka” Jepang, alat Fasisme Jepang, dan juga mengatakan bahwa negara yang baru memerdekakan diri ini adalah buatan Jepang. Boleh dikatakan perang urat saraf semacam itu cukup menegangkan, dan membingungkan.⁵

Pada lain pihak, Bung Karno mempunyai rencana untuk membentuk partai tunggal dengan nama partai Nasional Indonesia. Rencananya ini dikemukakan dalam

² Sudijono Djojoprajitno, *Demokrasi Kita, ala Hatta Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta Pusat : LPPM Tan Malak., 2008), hlm. 46.

³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 448.

⁴ Deliar Noer, *Membicarakan Tokoh-Tokoh Bangsa*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 135.

⁵ I.Wangsa Widjaja, *Mengenang Bung Hatta*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1988), hlm. 52.

sidang KNIP tanggal 29 Agustus 1945, dan partai tersebut sedianya diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso dengan wakil ketuanya Mr. Sartono.⁶

Tentu saja banyak pemimpin rakyat, khususnya Bung Hatta, yang menentang rencana Bung Karno ini. Adanya partai tunggal Dalam kehidupan negara demokrasi selain tidak memenuhi asas demokrasi yang ingin ditegakan, bahkan bertentangan dengan asas itu sendiri. Walaupun sempat melalui perdebatan hangat, PNI tidak jadi didirikan sebagai partai tunggal. karena dalam Sidang KNIP tanggal 29 Agustus tersebut lebih banyak pemimpin yang menentang gagasan Bung Karno itu daripada yang mendukungnya.⁷ Jadi dalam kondisi politik demikian, para pemimpin Indonesia harus dapat membuktikan bahwa kita mampu dan telah mendirikan satu pemerintahan yang demokratis.

Hatta merupakan salah seorang dari dua proklamator kemerdekaan Indonesia. Betapapun ada semangat dan peranan tokoh-tokoh lain dalam mendirikan Republik ini, kepercayaan utama diberikan kepada Soekarno dan Hatta. Dwitunggal memang dimulai pada masa-masa sulit menjelang proklamasi kemerdekaan, serta beberapa tahun sesudahnya. Soekarno pun pada waktu itu bagai tak dapat berbuat tanpa Hatta; malah berbagai keputusan mengenai hal-hal penting, diambil hatta dengan penuh pengertian dan persetujuan pada pihak Soekarno.⁸

Bila dalam masa yang cukup pendek pemerintah Indonesia yang baru lahir ini tidak berhasil memebentuk pemerintahan yang demokratis, bukan tidak mungkin

⁶ I.Wangsa Widajaja, *Ibid.*, hlm 52

⁷ I Wangsa Widajaja, *Ibid.*, hlm 52

⁸ Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 134.

pihak Belanda akan menang dalam diplomasi yang dilancarkannya untuk menentang berdirinya Republik Indonesia. jadi dalam suasana demikian, para pemimpin Indonesia harus dapat membuktikan bahwa kita mampu dan telah mendirikan satu pemerintahan yang demokratis.⁹ Hal-hal inilah yang terutama memenuhi pikiran Bung Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, Langkah-langkah kebijakan politik dan diplomasi yang bagaimana yang harus dilancarkan agar lebih menguntungkan posisi Indonesia.¹⁰

Salah satu langkah pertama yang dilakukan Mohammad Hatta selaku Wakil presiden yaitu dengan mengeluarkan pernyataan pemerintah atas nama Wakil Presiden yaitu yang di sebut Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Pada garis besarnya isi maklumat ini yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat di bentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, dan mulai berfungsi sejak tanggal 29 Agustus 1945 untuk sementara berfungsi sebagai DPR, sebelum terbentuk MPR dan MPR hasil pilihan rakyat. Badan ini untuk sementara waktu memikul tugas dan kekuasaan legislatif, dan ikut menetapkan Garis-garis Haluan Negara. Mengingat pentingnya tugas yang dipikul oleh KNIP sehari-hari, maka tugas itu dikerjakan oleh sebuah Badan Pekerja, yang dibentuk kemudian.¹¹

Kurang lebih setengah bulan dari keluarnya maklumat Wakil Presiden No.X atas usul Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sjahrir, maka disusul pula dengan maklumat Wakil Presiden berikutnya, yang berisi anjuran untuk membentuk partai-

⁹ I Wangsa Wijaya *Loc., Cit.* hlm 53.

¹⁰ I Wangsa Wijaya *Loc., Cit.* hlm 53.

¹¹ I Wangsa Wijaya *Loc., Cit.* hlm 53.

partai politik. Maklumat ini dikeluarkan tanggal 3 November 1945. Keluarnya kedua maklumat Wakil Presiden itu tidak lain untuk menunjukkan usaha kita menegakkan demokrasi di Indonesia dalam waktu yang relatif pendek itu.¹²

Beberapa tahun lamanya sistem parlementer, selama itu pula tercatat beberapa kali terjadi pergantian kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, kemudian Mr. Amir Sjarifuddin. Sampai pada gilirannya Bung Hatta diminta untuk menduduki jabatan perdana menteri, merangkap Wakil Presiden, dalam tahun 1948. Kabinet Hatta terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948, dan baru diumumkan dua hari kemudian yaitu pada tanggal 31 Januari 1948.¹³

Pada masa ini bersamaan dengan terbentuknya susunan Kabinet Hatta, Bung Hatta berhasil menyusun program Kebijakan politik Ini tertuang dalam Program kabinet Hatta, yang di ucapkan oleh Mohammad Hatta dalam keterangan pemerintah pada tanggal 16 Februari 1948, program kebijakan itu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Persetujuan Renville dan berunding terus atas dasar-dasar yang telah terdapat.
2. Melekaskan terbentuknya Negara Indonesia Serikat

¹² I Wangsa Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

¹³ I Wangsa Wijaya, *Loc Cit.*, hlm. 53

3. Mengadakan rasionalisasi Ke dalam
4. Pembangunan.¹⁴

Dalam program kebijakan ini tergambar usaha Pemerintah ke luar dan ke dalam. Ke luar ialah berunding dengan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan antara Belanda dengan kita, supaya lekas tercapai terbentuknya Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949. politik kedalam, ialah untuk menyempurnakan organisasi kita, dan dengan itu perbaikan penghidupan rakyat, yang hanya bisa dicapai apabila diadakan rasionalisasi besar-besaran beserta pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna, apabila dikerjakan rasionalisasi lebih dahulu. Kami berpendapat bahwa kekuatan kedudukan kita keluar dan kedalam satu sama lain bersangkutan paut. Kita tidak dapat mencapai kedudukan yang kuat keluar, apabila keadaan didalam kucar-kacir, lemah maupun politik atau ekonomi. Sebaliknya pula keadaan ke dalam tidak dapat dicapai, apabila kedudukan Republik Indonesia dalam lingkungan politik Internasional adalah lemah.¹⁵

Berdasarkan pemikiran singkat di atas, Ketertarikan penulis mengambil judul ini karena, Penelitian yang berkaitan dengan kebijakan politik Wakil Presiden Mohammad Hatta secara khusus jarang dilakukan, kebanyakan penelitiannya tentang biografi atau pemikiran Mohammad Hatta. Selain itu juga penulis sangat kagum dengan sosok Mohammad Hatta, karena mempunyai visi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu cara diplomasi Mohammad Hatta dengan

¹⁴ Koran Merdeka., *Kekuatan Kita Keluar Kedalam Sangkut Paut*. 2 September, 1948.

¹⁵ Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang, Keterangan Pemerintah Di Ucapkan Oleh Drs. Mohammad Hatta Di Muka Sidang B.P.K.N.P. Di Jogja Pada Tahun 1948*, (Jakarta : Kementrian Penerangan Republik Indonesia : 1951).

pihak Belanda sangat baik, sehingga bisa menjadikan Indonesia berdaulat seutuhnya. Pentingnya penelitian ini yaitu diharapkan dapat mengungkap bagaimana kebijakan itu bisa dilaksanakan dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Sehingga perlu kiranya peneliti mengangkat kajian mengenai tema ini ke dalam sebuah judul penelitian. Judul penelitian yang peneliti ambil adalah **“Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah riwayat hidup Mohammad Hatta ?
2. Bagaimanakah kebijakan politik Wakil Presiden Mohammad Hatta pada masa revolusi kemerdekaan RI (1945-1949) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian Ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui riwayat hidup Mohammad Hatta
2. Untuk mengetahui kebijakan politik Wakil Presiden Mohammad Hatta pada masa revolusi kemerdekaan RI (1945-1949).

D. Kajian Pustaka

Kaitannya dalam hal melakukan kajian pustaka diperlukan untuk ketelitian, karena uraian dalam kajian pustaka ini bersifat analitis sambil menunjukkan

kedudukan penelitian yang tengah direncanakan di antara hasil-hasil penelitian dan buku yang dimaksud.

Penelitian mengenai Tokoh Nasional Indonesia sudah sangat banyak dilakukan, namun secara spesifik Kebijakan Politik Mohammad Hatta sedikitnya sudah ada yang melakukan penelitian.

Kajian mengenai Mohammad Hatta antara lain dilakukan oleh Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung yaitu Siti Garini Indrastuti. Hasil penelitiannya yaitu:

“Mohammad Hatta Dan Ekonomi Kerakyatan Dalam Islam” lebih menekankan pada Riwayat hidup Mohammad Hatta dan paham-paham yang memengaruhinya tentang ekonomi kerakyatan serta bagaimana pemikiran ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam koperasi menurut Islam.¹⁶

Selain dalam bentuk skripsi dalam bentuk buku pun, beberapa sudah ada yang menuliskan mengenai Mohammad Hatta. Kajian buku pertama *“Mohammad Hatta Biografi Politik”*, oleh Deliar Noer. Buku tersebut tidak secara khusus membahas tentang Kebijakan Politik Mohammad Hatta (1945-1949). Namun, pembahasannya ada dalam sub bahasan. Dalam buku ini ada beberapa sub bahasan yaitu perkembangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan, dilanjutkan dengan berbagai kegiatan Hatta menjelang terbentuknya Kabinet Sjahrir I. Sesudah itu akan ditelusuri sikap, kegiatan, dan pendapat Hatta tentang berbagai masalah negara selama ia berfungsi sebagai Wakil Presiden ketika di Jawa, peranannya sebagai Wakil Presiden ketika di Jawa, peranannya sebagai wakil kepala negara dan pemimpin tertinggi di

¹⁶ Siti Garini Indrastuti, *“Mohammad Hatta Dan Ekonomi Kerakyatan Dalam Islam”* Skripsi, (Bandung: Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati Bandung,.1999).

Sumatera (1947), dan akhirnya sebagai Perdana Menteri sambil memegang terus fungsinya sebagai Wakil Presiden (1948-1949).

Kajian Buku kedua, "*Mengenang Bung Hatta*" oleh I. Wangsa Wijaya. Buku tersebut tidak Secara Khusus membahas tentang Politik Kebijakan Mohammad Hatta (1945-1949). Namun, pembahasannya ada dalam sub bahasan. Dalam buku ini memuat bahwa Bung Hatta semasa hidupnya adalah seorang tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia, sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno. Sebagai seorang pemimpin pergerakan, dalam tahun 1932, beliau dipilih menjadi Ketua Umum Pendidikan Nasional Indonesia, satu organisasi pergerakan yang biasa disebut PNI-baru, disamping Sutan Sjahrir yang juga tercatat sebagai pendiri organisasi pergerakan tersebut. Sebelumnya, dalam tahun 1926, Bung Hatta pernah terpilih menjadi Ketua Umum Perhimpunan Indonesia, yakni sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, yang bergerak dalam bidang politik dan dengan tuntutan kemerdekaan sepenuhnya bagi bangsa Indonesia.

Adapun penulisan skripsi mengenai "**Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)**" sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Selain itu, penulisan skripsi ini lebih menitikberatkan pada Kebijakan Politik wakil Presiden Mohammad Hatta sekaligus merangkap sebagai Perdana Menteri RI Tahun 1945-1949. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai Biografi Mohammad Hatta dan mengungkap Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan kerja, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Menurut Dudung Abdurahman, “langkah-langkah penelitian sejarah lazim juga disebut Metode Sejarah. metode itu sendiri berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.”¹⁷ Penelitian ini disusun berdasarkan sumber kepustakaan (*library reaserch*) berupa buku, ensiklopedia, majalah, jurnal, media massa, media elektronik maupun sumber-sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan. Suatu karya ilmiah pada dasarnya merupakan hasil dari penyelidikan yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menuju kebenaran. Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode dalam menghimpun data sampai menyajikan dalam bentuk cerita ilmiah. Oleh karena studi dan bentuk penelitian ini bersifat historis, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu suatu proses mengumpulkan data dan menafsirkan suatu gejala peristiwa atau gagasan yang timbul di masa lampau.¹⁸

Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah :

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, artinya sama dengan *to find* berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Sulasman menyatakan :

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 43.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2001), hlm. 12.

“Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Heuristik sejarah tidak berbeda dalam hakikatnya dengan kegiatan bibliografis yang lain sejauh menyangkut buku-buku yang tercetak. Akan tetapi sejarawan harus mempergunakan banyak material yang tidak terdapat di dalam buku-buku. Jika bahan-bahan itu bersifat arkeologis, epigrafis, atau numismatis, untuk sebagian besar ia harus bertumpu kepada museum. Jika bahan-bahan itu berupa dokumen-dokumen resmi, maka ia harus mencari di arsip, perpustakaan pemerintahan, dan lain-lain. Jika bahan-bahan itu merupakan dokumen-dokumen pribadi yang tidak terdapat dalam koleksi-koleksi resmi ia mungkin harus mencarinya di antara dokumentasi perusahaan-perusahaan, milik berharga kolektor autograf, dan sebagainya.”¹⁹

Dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)”** ini, penulis mencoba mengumpulkan beberapa sumber demi menunjang penelitian dari berbagai perpustakaan serta kearsipan. Dalam mencari sumber-sumber ini penulis mendatangi perpustakaan-perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perpustakaan BAPUSIPDA Jawa Barat, perpustakaan TNI AD kota Bandung, perpustakaan pribadi BATU API. Selain itu pun penulis mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan ada yang berbentuk sumber primer, maupun sekunder. Adapun sumber-sumber yang berbentuk primer²⁰ adalah :

- a) Sumber Tertulis dalam bentuk Arsip
 - 1) *Undang-Undang No. 11 Tahun 1949. Tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, (Jakarta: Arsip Nasional RI).
 - 2) *Piagam Penanda Tangan Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Arsip Nasional RI.)

¹⁹ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 93-94.

²⁰ Sumber primer adalah sumber pertama, yang diperoleh langsung dari pelaku dan orang yang menyaksikan peristiwa secara langsung dengan mata kepala sendiri.

b) Sumber Tertulis dalam bentuk Koran

- 1) Koran Merdeka, Kamis 19 Agustus 1948. *Soeara Rakjat Repoeblik Indonesia*, Djakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- 2) Koran Merdeka, 2 September, 1948. *Kekuatan Kita Keluar Kedalam Sangkut Paut*. Perpustakaan Nasional RI
- 3) Koran Merdeka, 2 September 1948. *Pertahankan Kabinet Sekarang*, Jokjakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- 4) Koran Penghela Rkayat, *Kearah Satoe Tentara dan Kesatoean Komando*, rabu 23 -4 – 1947.

c) Sumber Tertulis dalam bentuk Buku :

- 1) Mohammad Hatta, 1982. *Memoir*, Jakarta : PT. Tintamas Indonesia.
- 2) Mohammad Hatta, 1951. (*Mendayung Antara Dua Karang*) (*Keterangan Pemerintah Di Ucapkan Oleh Drs. Mohammad Hatta Di Muka Sidang B.P.K.N.P. Di Jogja Pada Tahun 1948*), Jakarta : Kementrian Penerangan Republik Indonesia.
- 3) Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni, 1979. *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta : PT Inti Idayu Press.
- 4) I.Wangsa Widjaya, 1988. *Mengenang Bung Hata*, Jakarta : PT Inti Idayu Press.
- 5) I.Wangsa Wijaya, Meutia F. Swasono, 1981. *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato*, Jakarta : PT Inti Idayu Press.
- 6) Mohammad Hatta, 1956. *Kumpulan Karangan jilid I*, Jakarta: Amsterdam, Surabaya : PT Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- 7) Mohammad Hatta, 2014. *Demokrasi Kita*, Bandung : Segarsy
- 8) A.H. Nasution, 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid II*, Jakarta: NV Sapdodadi

- 9) S.T. Rais Alamsjah, 1952. *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Bukit Tinggi – Djakarta – Padang : PT Mutiara.

Sumber-sumber yang berbentuk sekunder,²¹ diantaranya :

- 1) Adam Malik, 1980. *Mengabdikan Republik*, Jakarta : P.T. Gunung Agung.
- 2) Deliar Noer, 1990. *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta : LP3ES
- 3) Deliar Noer, 1980. *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- 4) M.C. Ricklefs, 2008. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- 5) Deliar Noer, 2012. *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- 6) Sudijno Djojoprajitno, 2008. *Demokrasi Kita (ala Hatta Dalam Teori & Praktik)*, Jakarta Pusat : LPPM Tan Malaka.
- 7) Deliar Noer, 2002. *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*, Bandung : Mizan.
- 8) William H. Frederick, 1982. *Pemahaman Sejarah Indonesia*, terj. Soeri Soeroto, Jakarta: LP3ES.
- 9) Soe Hok Gie, 2005. *Orang-Orang Dipersimpan di Jalan*, Bandung : PT Bentang Pustaka.
- 10) M. Dzulfikriddin, 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung : PT Mizan Pustaka
- 11) Yayasan Idayu, *Bung Hatta Kita*, (Jakarta : PT Inti Idayu Pres, 1980).

²¹ Sumber yang diperoleh dari pelaku ke dua atau orang yang tidak menyaksikan peristiwa secara langsung atau dengan kata lain sumber yang telah diolah.

2. Kritik

Dalam metode penelitian sejarah, tahap kedua setelah pengumpulan data adalah tahap kritik. Tahapan ini merupakan tahap penyeleksian terhadap sumber-sumber yang telah kita dapatkan di lapangan, baik berupa sumber tertulis, lisan, maupun benda sesuai prosedur yang telah ada. Seorang sejarawan dalam merekonstruksi sejarah harus menguji beberapa sumber agar mendapatkan sebuah fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat dua tahapan dalam tahapan kritik ini, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.²²

Kritik ekstern bertujuan menguji otentitas atau keaslian suatu sumber. Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, misalnya waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen. Aspek ekstern harus dapat menjawab, apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki (otentisitas), apakah sumber itu asli atau turunan (orisinalitas), apakah sumber itu masih utuh atau sudah diubah (soal integritas).²³

Sedangkan kritik intern bertujuan untuk mendapatkan sumber yang memiliki tingkat validitas atau keakuratan yang tinggi. Dalam hubungannya dengan kritik intern ini, Louis Gottschalk mengatakan bahwa, “setelah menetapkan sebuah teks otentik dan menentukan apa yang sungguh-sungguh hendak dikatakan oleh

²² Sulasman, *ibid.*, hlm.101.

²³ Helliuss Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Jogjakarta : Ombak, 2012), hal. 14-106.

pengarang, maka sejarawan baru menetapkan apa yang menjadi kesaksian saksi. Ia masih harus menetapkan kesaksian itu kredibel, dan jika memang demikian, sejauh mana”.²⁴

Kritik ekstern bertujuan menguji otentitas atau keaslian suatu sumber. Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, misalnya waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen. Aspek ekstern harus dapat menjawab, apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki (otentisitas), apakah sumber itu asli atau turunan (orisinalitas), apakah sumber itu masih utuh atau sudah diubah (soal integritas).²⁵

Sedangkan kritik intern bertujuan untuk mendapatkan sumber yang memiliki tingkat validitas atau keakuratan yang tinggi. Dalam hubungannya dengan kritik intern ini, Louis Gottschalk mengatakan bahwa, “setelah menetapkan sebuah teks otentikk dan menentukan apa yang sungguh-sungguh hendak dikatakan oleh pengarang, maka sejarawan baru menetapkan apa yang menjadi kesaksian saksi. Ia masih harus menetapkan kesaksian itu kredibel, dan jika memang demikian, sejauh mana”.²⁶

Langkah pertama dalam kritik intern yaitu menentukan sifat sumber itu (apakah resmi/formal atau tidak resmi/formal). Langkah kedua yaitu menyoroti penulis sumber tersebut sebab dia yang memberikan informasi yang dibutuhkan, dipastikan bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Dan ketiga, membandingkan

²⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 112.

²⁵ Hellius Sjamsuddin, *Op.*, Cit, hal. 14-106.

²⁶ Louis Gottschalk, *Op, Cit*, hal. 112.

kesaksian dari berbagai sumber dengan menjajarkan kesaksian para saksi yang tidak berhubungan satu dan yang lain sehingga informasi yang diperoleh objektif.²⁷

Dalam memahami sebuah konsep diatas, penulis berusaha menerapkan dengan semaksimal mungkin terhadap sumber yang telah didapatkan dari lapangan, sebagai salah satu contoh ialah sebagai berikut :

Penilaian buku yang berjudul “(*Mendayung Antara Dua Karang*)” karangan Mohammad Hatta. Buku ini merupakan keterangan Pemerintah yang di ucapkan oleh Mohammad Hatta di muka sidang B.P.K.N.P di Jogja pada tahun 1948. Dilihat dari segi ekstern, buku ini merupakan sumber yang dibutuhkan dan berkaitan dengan Mohammad Hatta. Penulis mendapat buku ini berupa foto copyan dari buku aslinya, tanggal penerbitan tahun 1951. Artinya buku ini di terbitkan sezaman dengan apa yang di kaji oleh penulis. Dari segi fisik, kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang digunakan tahun 50-an sehingga efeknya pun sekarang terlihat menguning. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa buku ini merupakan sumber yang dibutuhkan dalam bentuk asli dan masih utuh.

Dilihat dari segi intern, buku ini terbukti bahwa tulisan yang di paparkan merupakan gambaran yang objektif, dan di ungkapkan secara menyeluruh oleh Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Selain sumber berbentuk buku, penulis juga mendapatkan sumber yang berbentuk Koran yang terbit tahun 1947, 1948. seperti Koran Merdeka, Penghela Rakyat. Koran tersebut merupakan sumber primer, karena tahun terbitnya sezaman dengan apa yang penulis kaji.

²⁷ Hellius Sjamsuddin, *Loc., Cit*, hal. 113-115.

3. Interpretasi

Tahapan ini yaitu menghasilkan cerita sejarah, fakta yang sudah dikumpulkan harus diinterpretasikan. Interpretasi atau tafsir sebenarnya sangat individual, artinya siapa saja dapat menafsirkan. Seperti peribahasa “Lain rambut lain ubannya” bahwa meski datanya sama tetapi interpretasinya berbeda. Mengapa terjadi perbedaan interpretasi karena perbedaan latar belakang, pengaruh, motivasi, pola pikir, dll. Yang mempengaruhi interpretasinya, jadi interpretasi sangat subjektif tergantung siapa yang melakukannya, tergantung pribadinya masing-masing.²⁸

William Frederick menyatakan “interpretasi dilakukan dengan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang terdapat dalam referensi, sehingga diharapkan dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Bukti fakta sejarah tidak dapat menjelaskan apapun tanpa dibarengi dengan tafsiran manusia”.²⁹

Dalam penelitian yang berjudul **“Kebijakan Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)”**, penulis menemukan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan dan menghubungkan dengan teori yang berhubungan.

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk

²⁸ Suhartono W. Pranoto.2010. *Teori & Metodologi Sejarah* hlm 55.

²⁹ William H. Frederick, *Pemahaman Sejarah Indonesia*, terj. Soeri Soeroto (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 10.

mencapai tujuan itu. pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.³⁰

Politik yaitu sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, Peter Merkl menyatakan :

“Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)”.

Betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam pada itu tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.³¹

Hatta merupakan salah seorang dari dua proklamator kemerdekaan Indonesia. Betapapun ada semangat dan peranan tokoh-tokoh lain dalam mendirikan Republik ini, kepercayaan utama diberikan kepada Soekarno dan Hatta. Dwitunggal memang dimulai pada masa-masa sulit menjelang proklamasi kemerdekaan, serta beberapa tahun sesudahnya. Soekarno pun pada waktu itu bagai tak dapat berbuat tanpa Hatta; malah berbagai keputusan mengenai hal-hal penting, diambil hatta dengan penuh pengertian dan persetujuan pada pihak Soekarno.

Pada masa Revolusi tercatat beberapa kali pergantian kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana Menteri. Sebagaimana kita ketahui Sjahrirlah orang pertama

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 20.

³¹ Miriam Budiardjo, *ibid*, hlm 15.

kali dipercaya untuk memegang jabatan perdana Menteri, kemudian Mr. Amir Sjarifuddin. sampai pada gilirannya Bung Hatta diminta untuk menduduki jabatan Perdana Menteri, merangkap Wakil Presiden, dalam tahun 1948.

Pada masa itu Mohammad Hatta mengeluarkan dua kebijakan penting yaitu Pelaksanaan rasionalisasi dalam tubuh Tentara dan Penegasan kembali mengenai politik luar Negeri Indonesia dalam menghadapi Belanda. Setelah itu Kabinet Hatta terbentuk, dan mempunyai program, yaitu menyelenggarakan persetujuan renville, melekaskan Negara Indonesia Serikat, Rasionalisasi, dan pembangunan.

Program Kabinet Hatta ini disusun secara singkat dan sederhana. Tetapi mempunyai implikasi yang jauh. Ia juga luwes, bisa ketat dan bisa longgar. Keterangan Hatta kepada Badan Pekerja KNIP tentang program kabinetnya ini memperlihatkan keketatan tujuan yang hendak ia capai, tetapi dengan cara yang tampaknya disesuaikan dengan kondisi. Hatta berusaha menggalang persatuan dan saling pengertian antara Kabinet dan KNIP dalam menghadapi Belanda.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya Mohammad Hatta baik sebagai wakil presiden, maupun merangkap menjadi Perdana Menteri, ada yang menentang, baik dari pihak dalam negeri maupun luar negeri. Dalam melakukan analisis terhadap peristiwa ini, penulis menggunakan teori *Challenge and Responces* yang di ciptakan oleh Prof. Arnold J. Toynbee. Maksud dari teori challenge and responces ini yaitu kebudayaan terjadi dan dilahirkan karena tantangan dan jawaban antara manusia dengan alam sekitarnya. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan digerakkan oleh sebagian kecil dari pemilik kebudayaan Minoritas dari pemilik dan pencipta kebudayaan, dan masa mayoritas meniru, tanpa minoritas yang

kuat dan dapat mencipta, suatu kebudayaan tidak dapat berkembang. Apabila minoritas menjadi lemah dan kehilangan daya untuk mencipta, tantangan dari alam tidak dapat dijawab lagi. Apabila keadaan sudah memuncak seperti itu, keruntuhan akan terjadi.³²

Mengacu pada teori Challenge and Responses ini, bahwa Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri masa revolusi, mempunyai tantangan dari pihak Belanda yang ingin merebut kembali kedaulatan Republik Indonesia. Oleh sebab itu Mohammad Hatta dengan kewenangannya sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri mengeluarkan Kebijakan untuk merespon terhadap tindakan yang dilakukan oleh Belanda.

4. Historiografi

Dalam tahap ini peneliti merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Historiografi merupakan proses merangkaikan fakta dengan maknanya secara kronologis, diakronis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah.

Bab pertama, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta langkah-langkah penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, historiografi). Dalam bab ini digunakan untuk mengarahkan pembaca pada tahap langkah-langkah penelitian sebagai pijakan pembahasan berikutnya.

³² Sulasman, *Loc., Cit.* hal. 158-159.

Bab dua, membahas riwayat hidup Mohammad Hatta, yang didalamnya meliputi masa kecil dan kehidupan keluarga, perjalanan pendidikan, aktivitas politik dan organisasi, pemikiran Mohammad Hatta tentang nasionalisme.

Bab tiga, membahas kebijakan politik Wakil Prsiden Mohammad Hatta pada masa revolusi Kemerdekaan RI 1945-1949. Pada bab ini akan dibahas secara rinci Kondisi politik Indonsia pada masa Wakil Presiden Mohammad Hatta dan kebijakan-kebijakan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Bab empat, penulis akan menguraikan kesimpulan. Kesimpulan di sini, adalah menyimpulkan dari seluruh pembahasan yang penulis kaji di bab kedua, dan bab ke tiga. Setelah menyimpulkan, penulis akan menguraikan daftar sumber atau daftar pustaka.

